

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Partai politik (parpol) mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat, terdapat gagasan tertentu yang dimiliki parpol untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut menunjukkan arah dan tujuan serta fungsi parpol yang tidak dapat melenceng dari landasan hukum. Pada dasarnya parpol mempunyai tujuan yang sama, namun, setiap parpol mempunyai perbedaan gagasan maupun asas-asas yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara. Perbedaan ideologi dalam parpol merupakan aspek yang saling melengkapi, tujuan serta fungsinya secara garis besar berada pada dua poin; *pertama* lurus secara umum parpol sebagai organisasi masyarakat yang dapat menjadi wadah dalam mewujudkan kesejahteraan mereka; *kedua* tujuan khususnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemerintahan. (RI, Sekretariat Negara, 2008)

Aktivitas parpol lintas negara menjadi penunjang yang aktif dalam terwujudnya kesejahteraan Warga Negara Indonesia WNI. Secara birokratis parpol telah menjadi organisasi masyarakat yang resmi untuk melakukan aktivitas di luar negeri, untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945 seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan hak dan kewajibannya. Sedangkan parpol juga mempunyai kepentingan untuk membantu masyarakat secara menyeluruh di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian suara masyarakat di luar negeri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya, sedangkan pemerintah juga menyediakan tempat bagi pemilih wakil rakyat di luar negeri, seperti yang tertera dalam pasal 41-46 tentang penyusunan daftar pemilih bagi pemilihan luar negeri. (RI, Sekretariat Negara, 2008)

Berbagai kegiatan positif dapat dilakukan oleh parpol termasuk dalam memperjuangkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Warga Indonesia yang menjadi TKI hingga jumlahnya mencapai sekitar 6 juta orang (BNP2TKI, 2017) telah ditempatkan dan tersebar di berbagai negara seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Singapura dan Malaysia. Mereka semua membutuhkan perlindungan serta hak yang sama pada umumnya layaknya pekerja yang lain. Dengan demikian, dapat dimungkinkan bahwa parpol menjadi salah satu pihak yang juga memperjuangkan hak-hak TKI di luar negeri.

Pada dekade terakhir aktivitas parpol untuk TKI di luar negeri dapat ditandai dengan berbagai fenomena menarik sebagai bentuk pergerakan nyata. Di antara aktivitas tersebut adalah *blusukan* Partai Demokrat ke Singapura, Taiwan, Hongkong (Pambudi, 2014) kemudian pemberian sembako kepada TKI Arab Saudi oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS (Sjafei, 2016), begitu pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang mendesak pemerintah dalam perbaikan tata kelola TKI di Arab Saudi dan Timur Tengah (Hidayat, 2017). Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan nasib TKI di luar negeri, maka dengan aktivitas tersebut telah menunjukkan dukungan parpol terhadap TKI kepada pemerintah.

Interaksi parpol dengan para TKI di Malaysia dapat menjaga hubungan diplomatis antara parpol dan TKI dengan baik. Di satu sisi interaksi tersebut berguna untuk mengikat kepercayaan mereka kepada TKI dengan berbagai kegiatan, di sisi lain parpol juga menjalankan politik sesuai skema yang sudah ditetapkannya sendiri. Kondisi itu membuat hubungan yang menarik, ketika masa senggang seperti sekarang ini terdapat partisipasi parpol yang sudah mulai bermunculan ataupun yang masih aktif melakukan kegiatan. Di antara contohnya adalah gerakan partai Perindo pada Desember 2016 kemarin, di mana parpol tersebut sudah menyiapkan skema pengaturan

dalam pemulangan TKI dari Malaysia ke Indonesia oleh Dewan Perwakilan Luar Negeri DPLN (Okezone, 2016). Di sisi lain pandangan DPLN Partai Demokrat yang melihat peluang TKI sebagai potensi dalam pemilu 2019 mendatang (Hakim L. , 2017). Tidak hanya itu, aksi lain juga di tunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dimana PKB telah memberikan sumbangan kepada TKI yang terkena kanker hingga dapat kembali ke Indonesia. (Setiawan, Agus, 2017).

Skripsi ini akan menjelaskan tentang aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia tahun 2014-2018, di mana negeri jiran tersebut merupakan salah satu negara tujuan TKI terbesar dunia. Dapat dilihat dari jumlah data yang ada kurang lebih terdapat 6 juta TKI yang ada di luar negeri, dan hingga tahun 2015 terdapat 2.038 (ribuan orang) jumlah TKI di Malaysia (BNP2TKI B. I., 2015). Maka, dengan jumlah demikian tentu banyak aktivitas positif maupun negatif yang terjadi, serta dengan kondisi tersebut mereka juga dapat dijadikan subyek politik oleh parpol untuk mendapatkan suara. Sementara letak geografis antara Indonesia dan Malaysia sangatlah dekat dan luas, terdapat banyak titik jalur transportasi seperti di Nunukan, Batam, Tanjung Balai maupun melalui jalur udara menggunakan pesawat (Ihsanuddin, 2017).

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana Aktivitas Partai Politik Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia pada tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan penelitian

- a) Untuk Penulis

Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai parpol Indonesia terhadap TKI di Malaysia pada tahun 2014-2018. Penulis dapat memetakan aktor-aktor yang

terlibat dalam partisipasi parpol terhadap TKI di Malaysia. Disisi lain penulis juga dapat memahami regulasi hubungan yang terjadi dalam partisipasi parpol tersebut, kemudian penulis dapat pula memetakan tujuan serta politik parpol sehingga dapat memberi pemetaan fungsi dari parpol bagi TKI khususnya untuk mencapai kesejahteraan mereka. Maka pada akhirnya penulis dapat mengetahui dampak yang muncul dari interaksi parpol dengan TKI serta terhadap kebijakan pemerintah.

b) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian akademik ataupun pembelajaran mengenai aktivitas parpol Indonesia terhadap TKI di Malaysia dalam disiplin ilmu hubungan internasional khususnya gerakan transnasional. Kemudian dapat pula memberikan kontribusi studi mengenai migrasi terlebih kaitannya dengan TKI di Malaysia.

c) Untuk masyarakat

Membuka wawasan umum bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dalam penjelasan mengenai aktivitas parpol Indonesia terhadap TKI di Malaysia pada tahun 2014-2018. Dengan demikian masyarakat dapat memberi perhatian ataupun berpartisipasi politik dalam membantu penyelesaian masalah TKI di Malaysia.

1.4 Signifikansi

Pada dasarnya tema penelitian mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sudah banyak di tulis oleh para peneliti, namun, dalam konteks ini penelitian yang bertema Parpol dan TKI sejauh ini belum pernah dibahas oleh peneliti asing. Asumsi tersebut muncul dari beberapa buku maupun artikel yang penulis temukan seperti dari

penelitian Michelle Ford ataupun Wayne Palmer yang membidangi permasalahan TKI namun tidak menyinggung masalah aktivitas parpol. Penelitian mereka lebih fokus kepada aktivitas TKI legal maupun ilegal yang berhubungan dengan pemerintah, NGOs, dan komunitas-komunitas TKI di Malaysia. Oleh karenanya penulis melihat pada dekade terakhir ini justru banyak pergerakan parpol yang semakin luas jangkauannya terlebih untuk memperjuangkan kesejahteraan para TKI di Malaysia. Walaupun sebenarnya aktivitas parpol tersebut diiringi dengan banyaknya komunitas sosial yang bergerak di Malaysia dan menaungi mereka.

Ketidakpastian pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap TKI membuat parpol-parpol baru maupun lama masuk ke ranah aktivitas mereka, diantaranya untuk persiapan pemilu. Analisis tersebut membuat penulis lebih fokus kepada aktivitas parpol yang memiliki dimensi berbeda dengan komunitas-komunitas TKI di Malaysia tahun 2014-2018. Maka, penulis menganggap penelitian ini relevan untuk dibahas dalam perkembangan parpol, dimana sekarang sudah 27 parpol pendaftar dari pemilihan umum 2019 mendatang. (NADLIR, 2017) Dari jumlah tersebut terdapat parpol besar yang mempunyai hubungan erat dengan TKI di Malaysia, dengan durasi waktu pemilu yang semakin dekat parpol semakin meningkatkan kepercayaan kepada TKI maupun elit komunitasnya. hubungan parpol dengan TKI tersebut membuat penelitian ini menjadi pelengkap dari perspektif yang berbeda pada penelitian-penelitian yang lain dengan tema TKI di Malaysia.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup tentang aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia dengan penjelasan hubungan didalamnya. Hubungan antara pemerintah dan TKI

terkadang dijumpai oleh komunitas-komunitas TKI dan parpol, dimana mereka memiliki relasi yang saling menguntungkan. Namun sebenarnya TKI menjadi subyek dalam pergerakan parpol yang membuat regulasi dalam aktivitas tersebut. Perihal seperti ini memunculkan klarifikasi dalam kepentingan tertentu yang dapat terbagi menjadi dua, *pertama*, parpol ingin membantu tercapainya kesejahteraan dalam perlindungan TKI, *kedua*, kepentingan pribadi elit tokoh maupun parpol yang ingin mendapatkan suara dalam pemilu mendatang. Adanya regulasi pada aktivitas tersebut sebenarnya dapat dipetakan dengan tepat, bahwa fenomena aktivitas parpol di Malaysia membawa dampak tersendiri terhadap kondisi TKI di Malaysia.

1.6 Kajian pustaka

Fenomena transnasionalisme menarik untuk dibahas para pengkaji sosial seperti Alan Smart mengatakan bahwa fenomena transnasionalisme semakin berkembang, seiring perkembangan arus perekonomian terlebih di kawasan Asia Timur khususnya Tiongkok. Dari perkembangan tersebut muncul dua kerja sama sosial yaitu investasi transnasional dan migrasi (Smart, Alan Smart and Josephine, 2006). Riset mengenai kapitalisme dan migrasi dalam konteks transnasionalisme juga sudah ditulis oleh Smart melalui hubungan antar kapital dengan migrasi. Salah satu wujud migrasi yang dimaksud Alan Smart adalah TKI. Kneebone menjelaskan bahwa hak untuk bekerja dengan keamanan serta kesejahteraan yang baik harus dimiliki oleh para TKI. Untuk itu pemerintah membuat kantor perlindungan TKI yaitu BNP2TKI pada 2004 silam (Kneebone, Susan, 2010). Walaupun secara institusi telah dibuat BNP2TKI namun Joseph Liow menjelaskan bahwa permasalahan TKI di Malaysia tidak kunjung usai meski terdapat tujuan solusi jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Kedua negara tetap kontradiktif karena kurangnya kemampuan politik yang berdampak kepada turunya hubungan diplomatik keduanya (Liow J. , 2003). Upaya melawan pemerintah dari ilegal untuk menjadi buruh migran secara legal itu menuai langkah yang rumit Killias berpendapat bahwa skema identitas dari permasalahan “legal” maupun “ilegal” dalam status TKI mewarnai aktivitas keamanan bagi mereka. Dokumen yang dimiliki oleh TKI mempengaruhi skema regulasi keadaan dalam aktivitas mereka, kejelasan identitas tersebut menentukan perlindungan yang membuat TKI tersebut legal untuk bekerja. Disisi lain banyak TKI yang menjadi ilegal akibat pembuatan dokumen resmi tidak mudah karena banyak struktur yang harus dilewati (Killias, 2010).

Michelle Ford berpendapat bahwa diantara kasus TKI yang paling fenomenal adalah tragedi deportasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia di Nunukan Kalimantan Utara, hal itu menjadi parameter tersendiri bagi kebijakan pusat maupun provinsi di Indonesia. Banyaknya arus TKI yang tidak memiliki dokumen resmi telah di kembalikan oleh pemerintah Malaysia, terdapat sekitar 25.000 TKI harus menjalani deportasi yang diberlakukan pemerintah Malaysia secara paksa (Ford, Michele, 2006). Lebih dari itu respon Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh yang melaporkan bahwa terdapat 300 hingga 500 TKI per hari yang melaporkan masalah kekerasan yang dilakukan majikan di rumah yang didiami mereka (Silvey, Rachel, 2004) di samping itu Silvey berpendapat bahwa kasus pelecehan seksual, perlakuan kerja yang buruk, bekerja berlebihan dan tidak boleh meninggalkan rumah majikan mereka di Arab Saudi (Silvey, Rachel, 2004). Pada dekade terakhir muncul pula kasus yang ditulis Nicole Constable bahwa banyaknya TKI yang melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia di Hongkong. Hal itu terjadi akibat kesejahteraan TKI yang tidak terpenuhi dengan baik oleh pemerintah khususnya rezim

Susilo Bambang Yudhoyono yang telah diuntungkan oleh devisa dengan lebih dari 90.000 TKI pada tahun 2005 (Constable, 2009)

Setyawati berpendapat bahwa situasi perlindungan dari pemerintah kepada TKI di luar negeri secara umum memiliki kekurangan. Di Malaysia TKI mencari perlindungan bahkan di luar institusi pemerintahan, karena pemerintah dirasa kurang merespon kendala-kendala yang dihadapi. Walaupun terdapat BNP2TKI yang khusus memberi pelayanan kepada TKI serta diperkuat dengan keputusan presiden No 6/2006, masih saja perlindungan TKI dinilai gagal, demikian karena mereka justru dinaungi oleh banyaknya bantuan dari para NGO dan serikat buruh migran. (Setyawati, 2013). Hal itu berkaitan dengan pendapat Michelle Ford bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun NGOs untuk memberikan kesejahteraan yang diinginkan para buruh migran di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya kepulauan Riau antara Malaysia dan Singapura. Upaya pemerintah serta NGOs tersebut adalah *counter-trafficking* di perbatasan untuk mencegah upaya kriminalitas. Jalur tersebut bukan hanya dilewati pekerja gelap dari Indonesia ke Malaysia, namun terjadi berbagai kejahatan seperti perdagangan perempuan dan anak dari Indonesia ke luar negeri (Michelle Ford, 2012).

Penanganan TKI tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan terdapat pihak swasta yang dapat berkontribusi dan dapat dijadikan mitra kerja oleh pemerintah. Terlebih mengenai persoalan administrasi TKI yang membutuhkan pihak ke tiga agar dapat berjalan dengan lancar. Asumsi tersebut muncul berdasarkan respon pemerintah yang tidak dapat turun langsung di lapangan untuk memantau semuanya, mengingat banyaknya jumlah TKI di Malaysia dengan macam-macam persoalan yang terjadi. Oleh karenanya usaha antara pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan

perusahaan buruh migran seperti yang ada di Hongkong relevan dilakukan pemerintah (Palmer, 2013).

Michelle Ford berpendapat bahwa kelompok-kelompok NGOs muncul setelah orde baru, banyak aktivitas yang berusaha membela buruh migran. Kala itu pemerintah belum memberi perhatian penuh terhadap perlindungan HAM dan hak buruh migran. Namun, pergerakan aktivis buruh semakin meningkat khususnya di Indonesia maupun di Filipina dalam negeri maupun luar negeri. Hingga pada akhirnya tahun 2002-2003 muncul seperti (*Federation of Migrant Worker Organizations*) FOBMI, Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia JBMI, dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia ATKI. (Ford, Michele, 2004) Karena terdapat disfungsi pemerintah maka muncul gerakan transnasional LSM seperti yang dijelaskan oleh Nicola Piper mengenai banyaknya pekerja asing di Malaysia dan Singapura yang bermasalah sehingga membuat LSM buruh migran kedua negara aktif. Diantara negara pengirim buruh migran besar adalah Indonesia, maka beberapa aktivis buruh, SNTUC (Singapura), MTUC (Malaysia) serta LSM buruh Indonesia mengadakan rapat di Jakarta (Piper, 2006)

Reevany Bustami berpendapat bahwa regulasi sosial dalam politik di Malaysia membawa dampak yang tidak menentu karena banyak kepentingan yang berada di atas dinamika imigran asal Indonesia. Kondisi tersebut semakin kompleks dalam hubungan keduanya serta membawa dampak yang lebih luas, khususnya dampak yang terjadi akibat kepentingan sepihak. Faktor politik tersebut akhirnya membawa kepentingan yang dapat membawa pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia maupun di Malaysia. (Reevany Bustami, 2016). Di sisi lain Michelle Ford menjelaskan bahwa kondisi perekonomian negara membuat siklus peningkatan jumlah TKI Ilegal meningkat pada akhir dekade tahun 90an terutama bagi Tenaga Kerja Wanita TKW dari pelabuhan Tanjung Pinang. Hal itu mengakibatkan munculnya tiga tipe agen dalam

pencarian pekerjaan; *pertama* agen yang resmi dari menteri tenaga kerja Indonesia; *kedua* agen lokal yang tidak resmi namun mempunyai kontak dengan perusahaan Malaysia; *ketiga* mayoritas orang Jawa yang mempunyai paspor kemudian dengan nekat tanpa dokumen resmi pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. (Ford, 2001)

Setelah reformasi fungsi parpol semakin kuat, selain untuk memenangkan pemilu, parpol juga membangun aspirasi untuk menjalin upaya konstituennya seperti pendapat Sukmajati menjelaskan bahwa diantara tujuan utama parpol adalah memenangkan pemilu eksekutif maupun legislatif sehingga banyak upaya yang dilakukan parpol dalam interaksi sosialnya dengan masyarakat. Penanaman kepercayaan merupakan upaya yang dapat dibangun oleh parpol dalam negeri maupun di luar negeri. Namun demikian, tidak dapat dipastikan bahwa masyarakat yang sudah menjalin hubungan dengan parpol dapat mempertahankan loyalitasnya. Oleh karenanya untuk mendapat kepastian pada kepercayaan masyarakat tersebut, parpol harus melakukan sistem patronasi dalam lingkup budaya, agama, maupun sosial (Sukmajati, 2015). Sehingga dalam tulisannya Morris P. Fiorina dijelaskan bahwa parpol mempunyai *power* yang kuat di pemerintah, bahkan parpol dapat membuat pola yang ada pada kebijakan pemerintah. Sebagai negara demokrasi parpol di Amerika mempunyai kekuatan politik, kekuatan tersebut terstruktur dengan rapi sejak kemenangan Amerika pada perang dunia II hingga sekarang. Representasi dari masyarakat khususnya parpol dapat berperilaku agresif dalam mengawasi bahkan menyalahkan pemerintah, parpol menjadi pengontrol yang cukup efektif, seperti halnya fenomena kekuasaan parpol di wilayah negara bagian selatan Amerika akibat lemahnya pemerintah (Karnell, 1991).

1.7 Teori

Teori *Political Parties* adalah teori yang ditemukan oleh Kathleen Bawn, Martin Cohen, David Karol, Seth Masket, Hans Noel, and John Zaller yang berpendapat bahwa teori politik partai menunjukkan kelompok-kelompok kepentingan dan para aktivis menjadi aktor-aktor penting yang memiliki kesetiaan dalam agenda mereka. Tujuan dari teori ini adalah untuk meningkatkan agenda mereka. Sikap ini berbeda dengan teori yang dominan dalam hal ini parpol dikendalikan oleh politisi yang terbuka. Secara normatif perbedaannya terletak pada dominasi kelompok kepentingan dan aktivis yang kurang memberi respon terhadap pemilih (Kathleen Bawn, 2012).

Di sisi lain Bawn beserta timnya berasumsi bahwa aktivitas parpol dikontrol oleh politikus yang ingin menang pemilu diantaranya menggunakan *brand name* untuk memberi koneksi legislatif di luar DPR. Parpol berkoalisi dengan kawan politiknya untuk menominasi incumben agar dapat mendukung parpol untuk memenangkan pemilu. Dalam hal ini agenda parpol di Malaysia di kontrol langsung oleh aktor utama parpol yaitu pengurus DPC LN parpol yang juga memiliki kepentingan pribadi dengan KBRI untuk menyalurkan aspirasi TKI agar agenda mereka dapat terpenuhi.

Aktivitas antara parpol dengan organisasi masyarakat ataupun antar parpol itu sendiri merupakan bentuk pembangunan relasi dengan pemangku kepentingan serta aktivis TKI di Malaysia. Untuk memenangkan pemilu parpol perlu membangun hubungan dengan parpol lain ataupun komunitas lain yang dapat mendukung elektabilitas mereka. Di sisi lain pengurus parpol juga membangun relasi yang kuat kepada KBRI untuk mencapai kepentingan ekonomi mereka. eksistensi tersebut dibutuhkan agar parpol dapat menjaga hubungan baik dengan KBRI dan dapat memberi perlindungan terhadap TKI.

1.8 Metodologi

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai sarana pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, analisis, wacana historis dan *setting* alamiah untuk memahami fenomena. (Bakry, 2016) Di sini penulis menjelaskan fenomena transnasional yang mendalam sehingga membutuhkan pemahaman yang cukup spesifik di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berupa wawancara, observasi, dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat digunakan memahami fenomena pergerakan parpol di Malaysia yang unik dan kekinian dan perlu dipahami secara detail (Rahmat, 2009). Oleh karenanya, pemahaman dalam fenomena tersebut menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan kejelasan mengenai aktor yang terlibat. Dengan demikian penulis dapat memetakan struktur fenomena serta menjelaskan hubungan parpol dengan TKI secara sistematis dan runtut.

Pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan enam pendekatan; *pertama* mengumpulkan data dengan wawancara atau pengamatan akademis; *kedua* melakukan wawancara kepada tokoh yang berpengaruh ataupun orang biasa yang dapat memberi contoh bagi populasi yang besar; *ketiga* wawancara untuk mendapatkan informasi dan menjawab pertanyaan penelitian; *keempat* observasi untuk mengamati peristiwa dan kasus yang obyektif; *kelima* memberikan informasi dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, namun tidak selalu merespon pertanyaan yang ada; *keenam* penulisan dengan mengumpulkan arsip penting yang telah dikumpulkan dari jurnal, rekaman suara, dan penelitian lainya (Creswell, 2007).

Untuk mengamati aktivitas parpol di luar negeri khususnya di Malaysia, banyak tokoh yang di jadikan obyek dalam wawancara maupun observasi untuk mendapatkan data. Adanya metode kualitatif ini penulis menjelaskan secara rinci bagaimana

sebenarnya fenomena yang terjadi di lapangan. Secara obyektif penulis melakukan wawancara kepada;

1. Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.
2. Divisi pusat data, perlindungan dan hukum Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI.
3. Dewan Pimpinan Pusat DPP parpol di Jakarta.
4. Perwakilan luar negeri parpol di Malaysia.
5. Aktivis komunitas TKI di Malaysia; SERANTAU, IKMA (Madura), Nahdhatul Ulama NU, Muhammadiyah, Migrant Care dan lain-lain.

Dimana mereka mempunyai jaringan terhadap para elit komunitas TKI di Malaysia maupun di Indonesia serta dapat memberi data primer maupun sekunder kepada pembuatan skripsi ini. Maka, wawancara penulis yang diawali dengan wawancara DPP parpol tersebut dapat membuka pintu pada aktris komunitas TKI di Malaysia, sekaligus menjadi dasar dari proses pengambilan data setelah pengumpulan informasi pada latar belakang skripsi.